

**EFEKTIFITAS KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DI KECAMATAN BOLAANG TIMUR
KABUPATEN BOLAANG MONDONDOW”.**

Oleh

Lazuardi Makalalag

ABSTRACT :To achieve harmony , synchronization and integration of all program / development activities undertaken by the village government and village communities , it is necessary to coordinate the planning of rural development . But the reality shows that the coordination of many rural development planning has not been effective . This study aimed to determine how effective coordination of development planning in rural districts of East Bolaang Bolaang Bolaang .

This study uses qualitative methods . Informants drawn from various parties related to development planning in the rural village heads , BPD , LPM , PKK , social organizations in the village , and the village residents . A total number of 20 informants . Primary data were collected by interview .. Analysis using qualitative analysis of interactive models .

Based on the results of the study conclude : (1) Coordination with village planning is done effectively through rural development planning involving stakeholders such as BPD , Institute of Rural Community (LPM , PKK) , organization / community groups , and leaders / community leaders . (2) The effectiveness of coordination of rural development planning is demonstrated by several things: (a) the plan of development programs in general are set in accordance with the aspirations and needs of the local community , and (b) plan development programs are generally set shows alignment , synchronization , and integration , as well as interrelated and mutually supportive ; (c) plan development programs set in general can be implemented in an orderly , organized and smoothly .

Departing from the results of this penellian then suggested : (1) For more effective coordination of development planning in the village , the village head held in accordance with the authority should be able to contribute to the fullest ; (2) For more effective coordination of development planning in the village so it will need cooperation which either of the parties relating to rural development planning

Keywords: Effectiveness, Coordination, Planning

PENDAHULUAN

Salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia selama ini ialah keterikatan dan orientasi pada pembangunan nasional disegala bidang yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan dengan

penekanan-penekanan tertentu pada setiap tahap sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pembangunan nasional dan hasil-hasilnya harus dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, sehingga dapat memampukan mereka untuk membangun atau mempengaruhi masa depan yang lebih baik.

Namun kenyataan selama ini menunjukkan bahwa suatu pembangunan secara besar-besaran dari masyarakat desa masih menemui kesulitan dan kendala yang disebabkan oleh keterbatasan dana dan sumberdaya manusia yang terbatas untuk menjangkau daerah-daerah pedesaan, sehingga pembangunan desa sedapat mungkin harus direalisasikan dengan bantuan minimal dari pemerintah. Dengan kondisi seperti itu maka inisiatif dan partisipasi

masyarakat desa itu sendiri menjadi sangat penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong agar pembangunan desa dapat dilaksanakan secara partisipatif.

Agar pembangunan desa secara partisipatif dapat berjalan dan mencapai sasaran yang diharapkan maka perencanaannya harus dilakukan secara efektif. Seperti yang dikatakan oleh Nugroho (2003) bahwa perencanaan merupakan kegiatan dari proses pembangunan yang paling prioritas, karena perencanaan menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan.

Dari pengamatan yang dilakukan di beberapa desa di wilayah kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow nampaknya bahwa koordinasi perencanaan pembangunan desa belum berjalan efektif. Kerjasama dan komunikasi diantara unsur-unsur yang terkait dalam perencanaan pembangunan desa belum berjalan efektif. Forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa juga belum berfungsi maksimal. Belum efektifnya koordinasi perencanaan pembangunan desa menyebabkan rencana program-program pembangunan desa yang buat oleh pemerintah desa seringkali tidak sinkron atau tumpang tindih dengan

rencana program pembangunan yang disusun oleh masyarakat sendiri. Program pembangunan desa yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan program yang dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat seringkali berjalan sendiri-sendiri atau tidak terpadu.

Belum efektifnya koordinasi perencanaan pembangunan di desa dapat disebabkan antara lain karena lemahnya kepemimpinan kepala desa seperti kurangnya koordinasi antara pimpinan (kepala desa/sangadi) dengan bawahan atau dengan lembaga-lambaga lainnya, misalnya LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat), BPD (badan permusyawaratan desa). Selain itu, Kepala Desa juga belum mampu mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan mitra pemerintah desa LPM dan PKK dan organisasi kemasyarakatan, dan tokoh/pemuka masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai suatu jenis penelitian metode kualitatif. Menurut Moleong (2006) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian

yang bermaksud untuk memahami fenomena sosial, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan maka konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah koordinasi perencanaan pembangunan desa. Yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan desa disini adalah proses penyusunan dan penetapan rencana program-program pembangunan desa yang disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa (LPM, PKK) dan berbagai unsur masyarakat (organisasi sosial, keagamaan, dan kelompok masyarakat lainnya) dalam suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa. Sedangkan yang dimaksud dengan koordinasi perencanaan pembangunan desa adalah usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa (kepala desa) untuk mensinkronisasikan, mengharmonisasikan, mengintegrasikan, dan menyatupadukan rencana program dan kegiatan pembangunan di desa yang dilaksanakan

oleh pemerintah desa dan masyarakat desa

C. Sumber Data (Informan)

Penelitian ini dilaksanakan di desa-desa yang ada dalam wilayah kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan mengambil sampel 4 (empat) Desa yang dipilih secara random/acak dari 9 Desa yang ada di kecamatan tersebut. Adapun desa-desa yang terpilih sebagai sampel adalah Desa Lolan, Desa Bolaang, Desa Tadoy, dan Desa Ambang I.

Teknik penentuan sumber data (informan) yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive* atau pengambilan informan dengan sengaja atau dengan tujuan tertentu. Jumlah seluruh sumber data/informan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 20 orang,

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan instrumen dan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (interview), yaitu melakukan dialog atau tanya jawab langsung dengan para informan. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara

yang telah dipersiapkan lebih dahulu. Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data primer.

2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap peristiwa yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data hasil observasi ini juga bersifat melengkapi data hasil wawancara.
3. Studi Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dari dokumen-dokumen tertulis atau data statistik desa yang telah tersedia. Teknik studi dokumentasi ini digunakan untuk pengumpulan data sekunder.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Bogdan & Biklen (dalam Bungin, 2010) mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan : bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan menurut Sieddel (dalam Moleong, 2006), proses analisis data kualitatif terdiri dari : (1) mencatat yang

menghasilkan catatan lapangan, (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengkasifikasikan, mensintesisakan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, (3) berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Adapun teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew. B. Miles dan Michael Hubermann (*dalam* Rohidi dan Mulyarto, 1992) dengan langkah-langkah analisis seperti pada gambar di bawah ini.

- a. Pengumpulan Data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

- c. Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah pemahaman, penafsiran data dan penarikan kesimpulan.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian tersebut maka dilakukan wawancara terhadap para informan yang diambil dari berbagai unsur terkait di 4 desa lokasi sampel penelitian yaitu : unsur pemerintah desa, unsur badan permusyawaratan desa (BPD), unsur lembaga kemasyarakatan desa (LPM dan PKK), unsur organisasi sosial/kemasyarakatan di desa, dan unsur masyarakat umum. Jumlah seluruh informan yang berhasil diwawancarai ada sebanyak 20 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan menunjukkan perencanaan pembangunan desa, baik RPJMD maupun RKPD pada desa-desa di wilayah kecamatan Bolaang Timur disusun dan dikoordinasikan oleh pemerintah desa (kepala desa) melalui forum musyawarah perencanaan

pembangunan desa secara partisipatif yang melibatkan semua pihak yang terkait baik lembaga kemasyarakatan desa maupun unsur-unsur kelompok masyarakat. Semua kepala desa yang diwawancarai mengungkapkan hal yang sama tentang koordinasi perencanaan pembangunan desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa,

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian tinjauan pustaka bahwa hakekat koordinasi adalah upaya untuk menciptakan atau mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang, atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai hasil secara efisien dan efektif. Oleh karena itu efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari tingkat keserasian, sinkronisasi, dan integrasi dari rencana program-program pembangunan desa yang ditetapkan itu, dan tingkat keteraturan dan kelancaran pelaksanaan rencana program pembangunan desa tersebut.

Secara umum efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan

desa pada semua desa yang diteliti, sudah cukup baik dilihat dari aspek keserasian, sinkronisasi, dan integrasi dari program-program pembangunan desa yang ditetapkan baik RPJMD maupun RKPD. Menurut pengakuan para kepala desa yang diwawancarai bahwa rencana program-program pembangunan desa yang ditetapkan di desa mereka pada umumnya sinkron dan selaras atau sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan/kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan, serta ada integrasi atau kesatupaduan, saling menunjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Beberapa pernyataan atau pendapat tentang kelancaran pelaksanaan rencana program-program pembangunan desa yang ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, setidaknya juga dapat merefleksikan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan desa di wilayah kecamatan Bolaang Timur.

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah diuraikan dalam tinjauan pustaka di atas bahwa koordinasi merupakan fungsi administrasi/manajemen yang berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mengsinkronisasikan,

mengintegrasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Koordinasi merupakan suatu teknik untuk mempersatukan sejumlah keahlian dan perhatian yang saling berbeda, dan memimpinkannya kearah tujuan bersama. Koordinasi merupakan "*centripetal force*" atau kekuatan memusat di dalam administrasi (Pfillner dan Presthus dalam Sugandha, 1998). Dengan demikian, maka didalam segala kegiatan yang mengikutsertakan beberapa unit kerja, beberapa pejabat, ataupun beberapa instansi sekaligus, maka koordinasi sangat diperlukan. Karena, tujuan dari koordinasi perencanaan adalah agar rencana yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan teratur, tertib, lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Artinya, dengan adanya keserasian, sinkronisasi dan integrasi program yang ditetapkan maka kegiatan pelaksanaan program akan berjalan teratur, tertib, lancar.

Koordinasi akan sungguh diperlukan bilamana setiap instansi ingin

mencapai produktivitas yang berdayaguna (efisien) dan berhasilguna (efektif). Karena koordinasi diperlukan itu mulai dari tahap perencanaan program/kegiatan, tahap pelaksanaan program/kegiatan, bahkan sampai pada tahap evaluasi atau penilaian program/kegiatan. Demikian halnya, karena keterpaduan dan keserasian semua usaha dan kegiatan, pemikiran, dana dan daya guna dari semua pemegang fungsi akan merupakan sesuatu kekuatan yang ampuh sehingga kelemahan-kelemahan akan dapat teratasi (Sugandha, 1998).

Dari uraian teoritis tersebut dapat dipahami bahwa hakekat koordinasi adalah upaya untuk menciptakan atau mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang, atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai hasil secara efisien dan efektif. Oleh karena itu efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan desa akan nampak pada tingkat keserasian, sinkronisasi, dan integrasi dari rencana program-program pembangunan desa yang ditetapkan itu, dan tingkat keteraturan dan kelancaran

pelaksanaan rencana program pembangunan desa tersebut.

Penelitian ini sebagaimana telah dideskripsikan di atas menemukan bahwa koordinasi perencanaan pembangunan pada desa-desa di wilayah kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, pada umumnya telah dapat dilaksanakan dengan efektif oleh kepala desa. Penyusunan perencanaan pembangunan desa baik rencana pembangunan menengah desa (RPJMD) maupun RKPD ditetapkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan di desa yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK), pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan di desa, para tokoh/pemuka masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Dengan demikian, efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan desa pada semua desa yang diteliti, sudah sudah efektif dilihat dari aspek keserasian, sinkronisasi, dan integrasi dari program-program pembangunan desa yang ditetapkan baik RPJMD (rencana pemerintah jangka menengah desa) maupun RKPD (rencana kerja pemerintah desa). Karena dari hasil wawancara yang dilakukan kepada

responden semuanya menyatakan bahwa rencana program-program pembangunan desa yang ditetapkan di desa mereka pada umumnya sinkron dan selaras atau sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan/kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan, serta ada integrasi atau kesatupaduan, saling menunjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan pada desa-desa di wilayah kecamatan Bolaang Timur ditunjukkan oleh beberapa hal yaitu : (a) rencana program-program pembangunan yang ditetapkan/dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, pada umumnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat; dan (b) rencana program-program pembangunan yang ditetapkan/dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut umumnya menunjukkan adanya keselarasan, sinkronisasi, dan integrasi, serta saling terkait dan saling menunjang; (c) rencana program-program pembangunan yang ditetapkan/dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa pada umumnya dapat dilaksanakan dengan tertib, teratur dan

lancar, serta mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa koordinasi perencanaan pembangunan desa di kecamatan Bolaang Timur pada umumnya sudah efektif, yaitu dapat menghasilkan program-program pembangunan desa yang selaras, sinkron, dan terintegrasi sehingga pelaksanaannya dapat berjalan tertib, teratur dan lancar.

Implikasi dari hasil penelitian tersebut adalah perlunya koordinasi di dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan integrasi keseluruhan program/kegiatan pembangunan di desa. Oleh karena itu, kepala desa harus dapat berperan maksimal dalam menciptakan koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan di desa. Kepala desa sebagai koordinator perencanaan pembangunan di desa harus dapat menciptakan hubungan kerja sama yang baik dan harmonis dengan pihak-pihak terkait dalam perencanaan pembangunan desa, terutama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, dan lain-lain), juga dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi

sosial kemasyarakatan yang ada di desa. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pembangunan mempunyai wewenang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, yaitu memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas pada Bab IV di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koordinasi perencanaan pembangunan yang dilakukan pada desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Bolaang Timur sudah berjalan secara efektif. Karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat, itu melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK), organisasi/kelompok

masyarakat, dan tokoh/pemuka masyarakat.

2. Rencana program pembangunan pada desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Bolaang Timur sudah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat dan program-program pembangunan yang ditetapkan pada umumnya menunjukkan adanya keselarasan, sinkronisasi, dan integrasi, serta saling terkait dan saling menunjang serta dilaksanakan dengan tertib, teratur dan lancar, serta mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dan beberapa penemuan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk lebih efektifnya koordinasi perencanaan pembangunan di desa, maka kepala desa harus lebih berperan dalam mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
2. Untuk lebih efektifnya koordinasi perencanaan pembangunan di desa maka sangat diperlukan kerja sama yang baik dari pihak-pihak terkait

dengan perencanaan pembangunan desa yaitu pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), Badan Permuswaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK), organisasi-organisasi masyarakat di desa, tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2000, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmosudidjo Prajudi, 1982, *Pengambilan Keputusan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Beratha I. Nyoman, 1992, *Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bryant Coralie dan Louise White, 1985, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang*, terjemahan, LP3ES, Jakarta.
- Marzuki Muhammad, 2004, *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif*, Modul PKM, Departemen Dalam Negeri-RI, Jakarta.
- Nugroho, Riant,D, 2003, *Reinventing Pembangunan : Menata Ulang*

- Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ohama, Y., 1999, *Kerangka Teoritis dan Metode-Metode Praktis untuk Participatory Local Social Development*, Pelatihan Internasional JICA untuk PLSD, JICA, Nagoya.
- Singarimbun, M. dan Sofian Effendy, 1992, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Syamsi Ibnu, 1996, *Pokok-Pokok Perencanaan, Pemrograman, dan Pembiayaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tjokrowinoto Moeljarto, 1987, *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- , 2000, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo Bintoro, 1987, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- , 1991, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Gie, The Liang, dkk, 1992, *Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Handyaningrat, S. 1995, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Siagian, S.P. 1994, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sugandha, D. 1998, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Intermedia, Jakarta.
- Stoner, L.J. dan Charles Wankel, 1996, *Manajemen*, terjemahan, Intermedia, Jakarta.
- Terry, G.R. 1990, *Asas-Asas Manajemen*, terjemahan, Alumni, Bandung.
- Westra Pariata, 1982, *Manajemen Pembangunan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumber Lain :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU
Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Perubahan Kedua Atas UU
Nomor 32 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa.